



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
KECAMATAN BOJONGGAMBIR**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BOJONGGAMBIR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena atas perkenan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bojonggambir Tahun 2024 telah selesai disusun dalam bentuk Dokuman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bojonggambir Tahun 2024 pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2024 yang berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan dilaksanakan di Kecamatan Bojonggambir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi kinerja berikut efisiensi anggaran. Capaian kinerja Kecamatan Bojonggambir sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran melalui Sasaran Strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.

Akhirnya dengan telah disusunnya ini, besar harapan kami Kecamatan Bojonggambir dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan aparatur pemerintah dan visi dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bojonggambir dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dapat diimplementasikan sebagai tolak ukur arah kegiatan tahun 2025.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi. Aamiin.

Bojonggambir, 31 Januari 2025

Kamat Bojonggambir



EDI MULYANA, A.Ks.

Pembina Tk.I

NIP. 19680905 199201 1 001

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bojonggambir Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Kecamatan Bojonggambir Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Pemerintah Kecamatan Bojonggambir Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan Bojonggambir Tahun 2024, sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dan

efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang

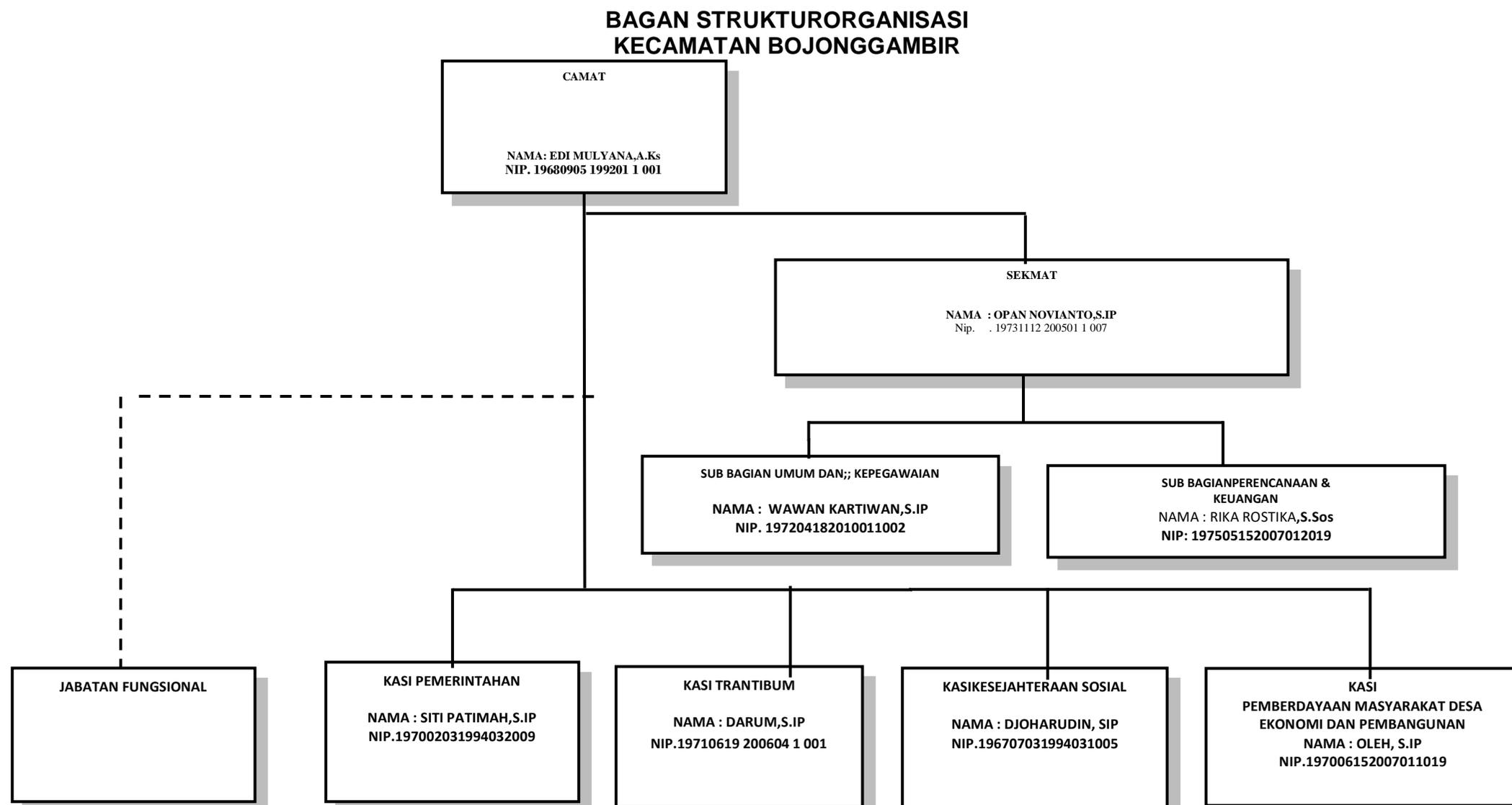
III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Susunan Organisasi Kecamatan Bojonggambir

A. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Bojunggambir terdiri dari:

1. Pimpinan adalah Camat;
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional



B. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1. Kepegawaian

Aspek kepegawaian pada Kantor Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 2. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi pemerintahan
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Kelompok jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab terhadap Camat. Seksi masing masing dipimpin Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Sub Bagian bertanggung jawab pada Sekretaris Kecamatan. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Bojongsambir sebanyak 8 (delapan) Orang dengan kedudukan sebagaimana pada table di bawah ini.

Sumber Daya Pegawai SKPD
Tabel 1.1

Personil Kecamatan Bojongsambir Berdasarkan Gender

No	Nama	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekmat	1	-	1
3	Seksi Pemerintahan	-	1	1
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1		1
5	Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa dan Ekonomi	1		1

6	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1		1
7	Kasubag Program dan Keuangan		1	1
8	Kasubag Umum dan kepegawaian	1		1
9	Fungsional Umum			
Jumlah		6	2	8

Pegawai menurut Eselon, Pangkat dan Golongan

Dari Keseluruhan Pegawai Kecamatan Bojongsambir yang berjumlah 8 orang semua telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Secara lengkap tentang Kepegawaian pada Organisasi Kecamatan Bojongsambir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : Struktur Kepegawaian Kecamatan Bojongsambir :

Tabel.1.2

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
5	Fungsional Umum	0
		8

Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Bojongsambir yang berjumlah 8 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 1.3

Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	0
2	S-1	8
3	Diploma	-

4	SLTA / Sederajat	-
5	SLTP / Sederajat	0
6	SD / Sederajat	-
	JUMLAH	8

Dengan dukungan 8 orang personil yang ada pada Kecamatan Bojonggambir dengan komposisi pendidikan, Sarjana 8 orang dan SLTA sebanyak 0 orang, SLTP sebanyak 0 orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mencapai dalam pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan capaian .

C. Isu Aktual

Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi di Kantor Kecamatan Bojonggambir tidak terlepas dari isu aktual di lingkungan Kantor Kecamatan itu sendiri. Sebagaimana di uraikan dalam Rencana Strategis 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur Desa
2. Penyusunan Renstra, Renja, lakip dan Laporan akhir Tahun Anggaran
3. Fasilitasi kebutuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat
4. Fasilitasi program dan Kegaitan di Desa
5. Pembinaan bidang pemerintahan desa
6. Pembinaan Linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketentraman ketertiban umum
7. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
8. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa
9. Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa

10. Peningkatan Fasilitas dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dan Pemerintah

11. Penyusunan data base sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada

D. Sistematika Penyusunan

LAKIP Kecamatan Bojongsambir mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan sebagai berikut :

Sistematika penulisan LAKIP Kecamatan Bojongsambir Tahun 2024 :

Bab I Pendahuluan

- (1) Kedudukan Tugas pokok dan fungsi
- (2) Struktur Organisasi
- (3) Aspek Kepegawaian dan sarana prasarana
- (4) Isu Aktual
- (5) Sistematika Penyusunan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini di uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

- 1) Formulir Renstra
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Formulir Rencana Kinerja Tahunan
- 4) Rencana Aksi
- 5) Lampiran lainnya dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Bojonggambir didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Bupati Tasikmalaya dan Camat Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2024 dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, dan Rencana kerja Tahun 2024, Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan Renstra kabupaten yaitu meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sesuai dengan tujuan di atas maka sasaran yang ingin di capai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bojonggambir
2. Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir

Tabel 2.1
Sasaran Program pada Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya

NO	SASARAN	PROGRAM
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojongsambir	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojongsambir	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojongsambir	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program pada Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya disesuaikan dengan mempertimbangkan isi strategis Tata kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan atas hal tersebut maka ditetapkan 5 (lima) program kegiatan pada Kecamatan Bojongsambir sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program pada Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang

didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan di tetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator Kinerja sasaran sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojonggambir	60 (cc)
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintah kecamatan Bojonggambir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojonggambir	80,85 Point
3.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100
4.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala daerah	100%
5.	Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bojonggambir	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang Undangan	100 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Strategis RPJMD dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 capaian kinerja rata rata baik.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran yang berkaitan dengan Misi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Katagori
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	60 (cc)	64,9(B)	91,21%	Cukup
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,85 Point	81,26 Point	99,52%	Baik
3	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%	99,29%	99,29%	Baik
4	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase potensi Konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Baik
5	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kesadaran dan Pahaman Tentang Hak, Kewajiban , Kewenangan dan Tugas Pokok Fungsi Lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya	100%	100%	100%	Baik

Prosentase capaian kinerja Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran diperoleh berdasarkan perbandingan target dan realisasi indikator sasaran yaitu dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian sasaran} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100 \%}{\text{Target}}$$

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 2 (dua) sasaran menunjukkan sebanyak 2 (dua) sasaran termasuk kedalam kategori Baik.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategi kesatu yaitu Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator Kinerja sasaran yang harus di capai yaitu “ Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut melaksanakan 1 (satu) program (program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten sebagaimana tabel berikut :

a. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Katagori
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	61 (B)	64,9 (B)	91,21%	Cukup

b. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	59 (CC)	56,2 (CC)	61 (B)	64.9 (B)	61 (B)	64.9 (B)*Thn 2023

- c. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
1	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	61 (B)	64,9 (B)	91,21%	65 (B)

Pada sasaran kesatu realisasi Tahun 2024 ini belum ada penilaian AKIP dari Inspektorat, sehingga yang kami cantumkan capaian Nilai Tahun 2023 , adapun capaian tahun sebelumnya yaitu 64,9 point .

Dari aspek perencanaan lima tahun, capaian kinerja tahun 2023 terealisasi sebesar 64,9 point dari target Renstra sebesar 65 point, Capaian ini katagori Baik dan capaian Indikator Kinertja dari tahun ke tahun mudah mudahan dapat meningkat sehingga capaian target AKIP Kecamatan Bojongsambir dapat mendekati capaian Renstra yang telah di tetapkan.

Salah satu ukuran kurangnya capaian kinerja yang belum memenuhi target Resntra. adalah masih menjadi kendala pencapaian Kinerja kurangnya Sumber Daya Manusia di kantor Kecamatan Bojongsambir Tahun 2024 kurang memadai terdapat kepala seksi dan staf yang pensiun sehingga kinerja Kecamatan Bojongsambir mengalami hambatan.

Pegawai adalah salah satu aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi dan kemampuan aparatur juga dapat ditingkatkan.

Capaian nilai evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentunya melalui penguatan beberapa aspek/ komponen seperti perencanaan dan pengukuran Kinerja serta evaluasi internal di lingkungan pemerintahan daerah. Adapun uapaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reuiu program kegiatan pada Renwal , Renja dan Renja perubahan Tahun Anggaran 2024

- b. Melaksanakan Asistensi penyusunan , perencanaan dan penetapan anggaran Tahun 2024
- c. Melakukan integrase e saki dan e kinerja

Dalam capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan tentunya di dukung dengan Program kegiatan yang di laksanakan di kantor Kecamatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Sasaran Strategi Kedua yaitu Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan, dengan indicator Kinerja yaitu “ Indeks Kepuasan Msyarakat (IKM) Kecamatan. Target indicator Kinerja tersebut yang di capai Tahun 2024 yaitu sebesar 81,26 % , untuk mencapai indikator tersebut di dukung dengan Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik. sebagaimana table berikut

b. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Katagori
1	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,20 Point	81,26 Point	100%	baik

c. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,50 Point	80,50 Point	80,50 Point	81,26 Point	81.20 Point	81.26 Point

d. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,20 Point	81,26 Point	99,52%	81,95 Point

Pada sasaran kedua realisasi Tahun 2024 ini tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu capaian Tahun 2023 mencapai 81,26 point dan dalam capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tahun 2024 yaitu 81,26 Point.

Dari aspek perencanaan lima tahun, capaian kinerja tahun 2024 terealisasi sebesar 81,26 point dari target Renstra sebesar 81,89 point. Dilihat dari persentase tingkat capaian pelaksanaan Kinerja Kecamatan Bojonggampir masuk ke dalam katagori Baik, sehingga harus mampu mempertahankan Kinerja di masa yang akan datang. Faktor utama yang menjadi kendala pencapaian keberhasilan capaian kinerja adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang kurang memadai di Kantor kecamatan.

Dalam capaian Meningkatkan profesionalitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan, dengan indicator Kinerja yaitu “ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Kecamatan di dukung dengan Program kegiatan yang di laksanakan di kantor Kecamatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat.

Sasaran Strategis Ketiga yaitu Meningkatkan Koordinasi wilayah Kecamatan Bojonggampir dengan sasaran strategis yang ketiga terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang harus di capai yaitu :

1. Presentase gangguan ketentraman dan ketertiuban umum yang di tindaklanjuti
2. Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah

3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran ketiga di lihat pada capaian penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

a. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Katagori
1	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	Baik
2	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	Baik
3	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%	100%	100%	Baik

b. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100%	100%	Baik	100%
2	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Baik	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojonggambir	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%	100%	Baik	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas di ketahui rata rata capaian kinerja sasaran 100%, dengan koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah telah di laksanakan dengan hasil baik. Dengan capaian kinerja sasaran ke 3 (tiga) ada factor pendukung capaian kinerja pada program berikut :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Evaluasi Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di mana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada Bupati Tasikmalaya melalui Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Hasil evaluasi LPPD ini dapat di jadikan tolak ukur untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja pada masa yang akan datang.

B. Realisasi Anggaran.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Bojonggambir tahun 2024 dilakukan terhadap belanja daerah/operasional Kecamatan Bojonggambir. Anggaran dan realisasi APBD atas kegiatan yang strategis tersebut digunakan sebagai input pada kegiatan yang dilakukan .

Tolak ukur pencapaian target kinerja Kecamatan Bojonggambir juga terdapat kegiatan–kegiatan operasional lainnya yang mendukung pencapaian target kinerja Kecamatan Bojonggambir

Realisasi APBD pada Kecamatan Bojongsambir tahun 2024 yang mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**REALISASI ANGGARAN KECAMATAN BOJONGGAMBIR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING					URAIAN	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN (%)
						2.188.620.444	2.035.206.704	92,99%
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.499.118.244	1.349.877.504	90,04%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.499.118.244	1.349.877.504	90,04%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	820.381.906	757.356.942	92,32%
					Belanja tambahan Penghasilan ASN	678.736.338	592.520.562	87,30%
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	218.752.200	217.032.800	99,21%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.511.500	86.636.500	99,00%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.715.500	59.840.500	98,56%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	9.631.800	8.756.800	90,92%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover	7.201.200	7.201.200	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Benda Pos	288.000	288.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer	6.549.600	6.549.600	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Perabot Kantor	4.029.800	4.029.800	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Alat Listrik	1.685.100	1.685.100	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	10.785.000	10.785.000	100,00%
					Belanja barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.375.000	10.375.000	100,00%
					Belanja Sewa Alat kantor lainnya	750.000	750.000	100,00%
					Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000	1.000.000	100,00%
					Belanja sewa Peralatan Umum	7.000.000	7.000.000	100,00%
					Belanja Pemeliharaan	1.420.000	1.420.000	100,00%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1.200.000	1.200.000	100,00%
					Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar /Majalah	1.200.000	1.200.000	100,00%
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.950.000	2.950.000	100,00%
					Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	2.950.000	2.950.000	100,00%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.646.000	22.646.000	100,00%
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.641.000	4.641.000	100,00%
					Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota	18.005.000	18.005.000	100,00%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	19.865.000	99,33%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.865.000	99,33%
					Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.500.000	3.490.000	99,71%
					Belanja Modal Komputer Unit	16.500.000	16.375.000	99,24%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	39.800.000	39.235.500	98,58%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000	4.835.500	89,55%

					Belanja Tagihan Listrik	2.400.000	1.835.500	76,48%
					Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan	3.000.000	3.000.000	100,00%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.400.000	34.400.000	100,00%
					Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	26.000.000	26.000.000	100,00%
					Belanja Jasa Tenaga keamanan	8.400.000	8.400.000	100,00%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.440.700	71.295.800	99,80%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	61.240.700	61.095.800	99,76%
					Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.890.300	39.890.300	100,00%
					Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat angkutan	18.630.400	18.630.400	100,00%
					Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perijinan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.720.000	2.575.100	94,67%
7	01	01	2.09	09		10.200.000	10.200.000	100,00%
					Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi	7.470.000	7.470.000	100,00%
					Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.730.000	2.730.000	100,00%
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	220.250.000	219.182.500	99,52%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	191.000.000	189.932.500	99,44%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	191.000.000	189.932.500	99,44%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	15.447.600	15.447.600	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover	4.040.900	4.040.900	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer	2.266.500	2.266.500	100,00%
					Belanja Perlengkapan Dinas	10.285.000	10.285.000	100,00%
					Belanja barang untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	65.000.000	64.682.500	99,51%
					Belanja makan dan Minum Rapat	25.795.000	25.795.000	100,00%
					Belanja makan dan Minum Tamu	2.160.000	2.160.000	100,00%
					Belanja makan dan Minum Aktifitas lapangan	1.250.000	1.250.000	100,00%
					Belanja Honirarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	31.500.000	30.750.000	97,62%
					Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00%
					Brlanja Sosialisasi	25.500.000	25.500.000	100,00%
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.255.000	6.255.000	100,00%
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00%
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	3.058.000	3.058.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.042.000	1.042.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer	890.000	890.000	100,00%
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.010.000	10.010.000	100,00%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	14.250.000	14.250.000	100,00%
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	14.250.000	14.250.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.781.500	1.781.500	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover	468.500	468.500	100,00%
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000	12.000.000	100,00%

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	195.375.000	193.988.900	99,29%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	195.375.000	193.988.900	99,29%
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	195.375.000	193.988.900	99,29%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	5.863.300	5.863.300	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.134.500	1.134.500	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor bahan komputer	737.200	737.200	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	625.000	625.000	100,00%
					Belanja Barang untuk di jual/Diserahkan kepada Masyarakat	141.100.000	139.713.900	99,02%
					Belanja makanan dan Minuman Rapat	16.440.000	16.440.000	100,00%
					Belanja makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	2.970.000	2.970.000	100,00%
					Honorarium Narasumber atau Pembahas.Moderator, pembawa acara, dan Panitia	10.100.000	10.100.000	100,00%
					Belanja Sosialisasi/Uang Saku	9.000.000	9.000.000	100,00%
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.980.000	1.980.000	100,00%
					Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota	5.425.000	5.425.000	100,00%
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	25.000.000	100,00%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	25.000.000	25.000.000	100,00%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negar kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.258.100	1.258.100	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.475.400	1.475.400	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer	1.066.000	1.066.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	5.620.500	5.620.500	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor - Suvenir/ Cendera Mata	800.000	800.000	100,00%
					Belanja makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	4.000.000	100,00%
					Honorarium Narasumber atau Pembahas.Moderator, pembawa acara, dan Panitia	10.000.000	10.000.000	100,00%
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000	780.000	100,00%
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.125.000	30.125.000	100,00%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	30.125.000	30.125.000	100,00%
7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendatagunaan Aset Desa	13.950.000	13.950.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	1.416.000	1.416.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.086.400	1.086.400	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer	757.600	757.600	100,00%
					Belanja makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	4.800.000	100,00%
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.890.000	5.890.000	100,00%
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.175.000	16.175.000	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	348.600	348.600	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	151.400	151.400	100,00%
					Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	125.000	125.000	100,00%
					Belanja makanan dan Minuman Rapat			100,00%

						3.150.000	3.150.000	
					Belanja makanan dan Minuman Jamuan Tamu	650.000	650.000	100,00%
					Honorarium Narasumber atau Pembahas.Moderator, pembawa acara, dan Panitia	4.750.000	4.750.000	100,00%
					Belanja Sosialisasi/Uang Saku	7.000.000	7.000.000	100,00%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indicator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber tertentu daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bojonggambir Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

Sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Publik di Kecamatan Bojonggambir menunjukkan capaian indikator sebesar 99,21% dan indikator sasaran Tingkat Capaian Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bojonggambir menunjukkan capaian indikator sebesar 91,21 %.

Prosentase capaian kinerja di atas diperoleh berdasarkan perbandingan target dan realisasi indikator sasaran Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran.

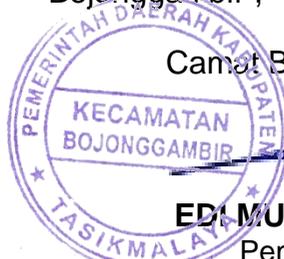
Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tentunya tidak dapat dijadikan acuan mutlak/satu-satunya dasar pertimbangan mutlak untuk mengukur tingkat capaian kinerja yang sesungguhnya. Secara sederhana pula dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi Kecamatan Bojonggambir tahun 2024 memiliki predikat baik.

Kecamatan Bojonggambir pada Tahun 2024 menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya, Sumber daya keuangan yang di gunakan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2024, dengan Rencana anggaran Rp. 2.188.620.444,00 dan Realisasi Anggaran Rp. 2.035.206.704,00 atau penyerapan anggaran mencapai 92,99%.

Akhir kata, dengan segala kekurangan didalamnya diharapkan kiranya LKIP Kecamatan Bojonggambir tahun 2024 ini dapat memenuhi standar akuntabilitas yang dipersyaratkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Bojonggambir kepada Bupati Tasikmalaya.

Bojonggambir, 31 Januari 2025

Camat Bojonggambir



EDIMULYANA, A.Ks

Pembina Tk.I

NIP. 19680905 199201 1 001